

Dinamika Muhammadiyah

Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

M Desta Ramadoni¹, Nor Huda², Sri Suriana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹email: destaramadoni98@gmail.com

Abstrak

Muhammadiyah merupakan organisasi yang berpengaruh khususnya dalam pembaharuan bidang pendidikan dan memberantas segala bentuk penyimpangan praktik peribadatan. Perkembangan Muhammadiyah di wilayah Sumatera sudah dimulai pada tahun 1925 di Minangkabau. Selanjutnya Muhammadiyah mulai dengan cepat menyebar ke wilayah pedalaman, yang berorientasi di pedesaan. Cepatnya persebaran Muhammadiyah hingga sampai ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammadiyah mendirikan sekolah dasar di wilayah pedesaan sekayu (Ulak Paceh) pada tahun 1926 yang merupakan Sekolah Muhammadiyah tertua yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Muhammadiyah selanjutnya mulai menampakkan perannya dengan melakukan gerakan dalam bidang ekonomi, dakwah dan kesejahteraan sosial, politik dan pendidikan.

Kata Kunci: -Muhammadiyah MUBA, -Amal Usaha, -Perkembangan

Abstract:

Muhammadiyah is an influential organization, especially in reforming the education sector and eradicating all forms of religious practice deviations. The development of Muhammadiyah in the Sumatra region began in 1925 in Minangkabau. Furthermore Muhammadiyah began to rapidly spread to the interior, which was oriented towards the countryside. With the rapid spread of Muhammadiyah to reach the Musi banyuasin Regency, Muhammadiyah established an elementary school in the rural area of Sekayu (Ulak Paceh) in 1926 which is the oldest Muhammadiyah school in the South Sumatra region. Muhammadiyah then began to show its role by carrying out movements in the fields of economy, preaching and social welfare, politics and education.

Key Word: -Muhammadiyah MUBA, -Charity Venture, -Development

A. PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 merupakan periode berdirinya organisasi pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan bermunculannya organisasi sosial-budaya, politik dan organisasi sosial-pendidikan serta keagamaan seperti halnya muhammadiyah, periode awal ini dikenal juga dengan istilah fajar kebangkitan nasional.¹ Kelahiran Muhammadiyah pada dasarnya merupakan respon yang juga memiliki tujuan untuk memperjuangkan semangat nasionalisme serta menghilangkan imperialisme dan kolonialisme yang telah lama ada di tanah nusantara. Selain semangat dari rasa

¹ M. Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 89.

nasionalisme, alasan lain yakni akibat adanya penyimpangan ajaran Islam yang terjadi di kalangan Sebagian umat Muslim Indonesia. K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta tepatnya di Kauman. pada tanggal 18 November 1912 M/ 08 Dzulhijjah 1330 H.² Fase ini merupakan awal perkembangan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan sendiri merupakan putra ketiga dari K. H. Abu Bakar, yang merupakan seorang khatib di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir sekitar tahun 1258 H/1868 M di wilayah Kauman, yang merupakan termasuk daerah mempunyai jiwa Keislaman yang kuat selain dari Karangjaken dan Kotagede.³ Secara umum, setidaknya ada tiga hal yang menjadi keprihatinan Ahmad Dahlan yakni *pertama*, keprihatinan dalam hal bentuk kepercayaan dan pengalaman beragama yang bermuara pada praktek agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan cenderung bersifat sinkretis. *Kedua*, keprihatinan dalam hal kondisi dan penyelenggaraan pendidikan yang jauh tertinggal dengan sekolah gubernemen, sehingga dalam hal ini mengakibatkan pendidikan menjadi terpuruk. *Ketiga*, mengenai gerakan-gerakan minoritas Kristen yang ada di Jawa sudah sangat intens, meskipun tidak disuarakan secara lantang tetapi Dahlan menangkap bahwa keinginan pemerintah kolonial untuk melakukan Kristenisasi di Jawa.⁴ Muhammadiyah kemudian menyebar hingga sampai ke wilayah Sumatera, keberadaan Awal Muhammadiyah di Minangkabau dapat dilihat dari pandangan Hamka dalam karyanya *Ayahku*, menjelaskan seputar Muhammadiyah yang ada di Minangkabau. Hamka menjelaskan bahwa Muhammadiyah ini di bawa secara individual, yakni atas peran H. Abdul Karim Amrullah sekitar tahun 1925 M/1344 H. Tujuan utama beliau mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau adalah untuk menghilangkan segala bentuk penyimpangan yang ada. Persebaran Muhammadiyah di Minangkabau ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yakni Syekh Jamil Jambek, St.Mansur dan St.Mangkuto serta adik beliau Yusuf Amrullah. Muhammadiyah dapat menyebar luas di Minangkabau tidak terlepas dari faktor kedekatan antara H. Abdul Karim Amrullah dan K. H. Ahmad Dahlan. Keduanya adalah murid dari Syekh Khatib Al-Minangkabau pada saat menimba ilmu agama di kota Makkah serta H. Abdul Karim Amrullah berkunjung ke Jawa karangan-karangan dari beliau diminta oleh K.H. Ahmad Dahlan yang kemudian disalin ke bahasa Jawa.⁵ Persebaran Muhammadiyah berlanjut ke daerah Bukit Barisan sebelah Selatan, yakni daerah Bengkulu. Setidaknya Muhammadiyah berkembang pesat di sana dengan berdirinya

² *Ibid.*, h. 86.

³ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 13.

⁴ Dja'far Siddik, "Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara"..., h. 6.

⁵ Muhamad Ikkal, dkk., "Sejarah Keberadaan Muhammadiyah di Minangkabau Perspektif Hamka dalam Karya "Ayahku" , *Jurnal Studi Al-Quran*, Vol. 14, No. 1 , (Tahun. 2018), h. 84.

tiga cabang di daerah Kepahiang, Curup, dan Bintuhan.⁶ Peeters menjelaskan Muhammadiyah berkembang pesat di daerah pedalaman Sumatra Utara sampai ke daerah bagian selatan Bukit Barisan. Sementara itu, bagian pesisir seperti Jambi, Palembang dan Teluk Betung menjadi pusat dari organisasi konservatif.⁷ Awal kemunculan Muhammadiyah di Keresidenan Palembang, yakni di wilayah pedesaan tepatnya di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tercatat pada tahun 1926 M/ 1345 H, bersamaan dengan berdirinya Sekolah Dasar Muhammadiyah.⁸ Muhammadiyah di wilayah Kota Palembang sendiri, baru diresmikan pada tahun 1931 daerah 20 Ilir. Muhammadiyah sampai tahun 1930-an masih di seputar Kota Sekayu dan beberapa tempat di luar Palembang.⁹ Barulah sekitar tahun 1930-an sampai tahun-tahun berikutnya terlihat peran Muhammadiyah, seperti berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah Palembang. Kemudian perluasan kembali terjadi hingga akhirnya Muhammadiyah mulai menjelaja ke wilayah pedesaan sekitar Palembang.¹⁰ Fenomena-fenomena tentang mengapa Muhammadiyah sampai terlebih dahulu di wilayah Sekayu dari pada di Palembang menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana perkembangan Muhammadiyah di wilayah Sumatera Selatan. Mengungkap proses masuknya Muhammadiyah di Sekayu dan persebaran serta pengaruhnya dalam melakukan dakwah penyebaran Islam, seputar dari bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang religius. Banyaknya pertanyaan mengenai penyebaran Muhammadiyah di Sumatera membuat beberapa ahli angkat bicara tentang fenomena ini tak terkecuali Jeroen Peeters yang dalam penelitiannya menjelaskan aspek religius yang ada di Palembang dan sekitarnya.

Terdapat perbedaan yang mencolok Muhammadiyah yang ada di Sumatera dengan yang ada di daerah Jawa, perbedaan ini selanjutnya dijelaskan bahwa basis pusat persebaran antara keduanya berbeda. Hal ini menjadi menarik bila dihubungkan dengan pertanyaan yang menyatakan apakah Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kota Sekayu menjadi pusat awal persebaran Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Beberapa hal yang perlu dijelaskan nantinya dalam penelitian ini seperti alasan mengapa Muhammadiyah ada di Sekayu, pengaruhnya dan aspek apa saja yang ikut serta menghantarkan Muhammadiyah di bumi *serasan sekate* tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan persebarannya.

⁶ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, terj. Sutan Maimoen (Jakarta : INIS, 1997), h. xviii.

⁷ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942...*, h. xix.

⁸ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 144.

⁹ *Ibid.*, h.144.

¹⁰ *Ibid.*, h. 145.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran Pustaka yang dilakukan oleh peneliti, maka telah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan topik yang di kaji dalam penelitian ini, yakni “Dinamika Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 1926-1998 M/ 1344-1418 H” diantara sebagai berikut:

Pertama, Elsi Maharani (1998) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Tentang Aktifitas Organisasi Muhammadiyah dalam Kegiatan Dakwah di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat” membahas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu dakwah Islam dalam memperbaiki praktek ibadah yang menyimpang dikalangan masyarakat. Elsi Maharani dalam penelitiannya melihat Muhammadiyah sebagai sarana dakwah Islami yang di tujuan dalam pemberantasan kebathilan, penelitian ini juga merujuk pada hal yang sama namun lebih kepada persoalan yang bersifat khusus seperti bagaimana keadaan Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan dalam masyarakat. Penelitian dari Elsi Maharani melihat Muhammadiyah sebagai solusi dari problem penyimpangan religius dan proses dakwah yang dilakukan Muhammadiyah dalam menyebarkan agama Islam. Tentu hal ini merupakan hal yang sama akan diteliti dalam penelitian Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin. Perbedaannya yakni di wilayah penelitian Elsi melakukan penelitian di Kabupaten Lahat terkhusus di Kecamatan Jarai sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin.¹¹

Kedua, menurut Muslandik (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Organisasi Terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Seri Kembang Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Perbandingan Terhadap Organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)”. Penelitian sebelumnya dengan melihat Muhammadiyah dalam gambaran sosial keagamaan yang tentunya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki perannya tersendiri.¹² Hal ini sedikit berbeda yang terjadi dalam penelitian di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebab dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus ke aspek perkembangannya. Namun, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslandik ialah kedua penelitian membahas mengenai sosial-keagamaan di wilayah setempat.

Ketiga, Prianto Mahasiwa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang (2014) dalam skripsinya yang berjudul “*Perkembangan Muhammadiyah Dan Perannya di*

¹¹ Elsi Maharani, “Studi Tentang Aktifitas Organisasi Muhammadiyah dalam Kegiatan Dakwah di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 1998), h. 6.

¹² Muslandik, “Dampak Organisasi Terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Seri Kembang Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Perbandingan Terhadap Organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2007), h.8.

Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu“ .¹³ Pembahasan tentang peran Muhammadiyah juga akan dicantumkan untuk melihat bagaimana pengaruh Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin. Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas peran dan pengaruh bagaimana Muhammadiyah melakukan gerakan pembaharuannya dalam masyarakat. Perbedaan dalam wilayah lokasi penelitian Prianto melakukan penelitiannya di wilayah Ulu Ogan sedangkan penelitian ini di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Keempat, buku karangan Zuhairini, dkk., tentang *Sejarah Pendidikan Islam*. Buku ini menjelaskan seputar keadaan masyarakat pada masa berdirinya Muhammadiyah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan alasan Muhammadiyah yang terbentuk sebagai lembaga yang bersifat permanen. Zuhairini coba menjelaskan posisi Muhammadiyah yang muncul sebagai solusi dalam pembaharuan bidang pendidikan.¹⁴ Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni persamaan pada aspek pendidikan, dalam penelitian ini juga yang mencoba melihat Muhammadiyah sebagai wadah dalam perbaikan moral bangsa yang menjadikan pendidikan sebagai medianya. Namun, ada perbedaan dengan penelitian Zuhairi dkk., dimana dan dalam penelitian ini juga akan sedikit ditambahkan mengenai perbandingan dengan sekolah kolonial baik dari segi sistem ataupun metodenya.

Kelima, penelitian dari Jeroen Peeters yang dijelaskan dalam bukunya berjudul: *Kaum Tuo Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Berbicara tentang iklim religius yang ada di Palembang, berkaitan dengan konsep persebaran dan gerakannya.¹⁵ Untuk mendukung dan melihat poses masuknya Muhammadiyah dirasa perlu untuk mengutip pendapat Jeroens yang mengatakan bagaimana perubahan religius yang terjadi di wilayah Palembang. Persamaan pembahasan dengan penelitian Jeroen Peeters ini yakni terdapat unsur persebaran religius di sumatra yang didalam buku *Kaum Tuo Kaum Mudo* selanjutnya di jelaskan mengenai Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Organisasi Islam Konservatif. Selain itu, penulis juga akan menyinggung masalah iklim religius yang sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang mempunyai misi fundamental dalam praktek religius yang dianggap menyimpang. Perbedaan dengan penelitian dari Jeroen Peeters adalah penelitian ini sebatas hanya membahas Muhammadiyah dan tidak menjelaskan perihal religius terlalu dapat sebab fokus penelitian adalah Muhammadiyah dan proses masuk dan berkembangnya.

¹³ Prianto, “Perkembangan Muhammadiyah Dan Perannya di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014), h. 4.

¹⁴ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.158

¹⁵ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942...*, h. xvii.

Keenam, Abu Su'ud menjelaskan di dalam bukunya *Islamologi: Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*. Menjelaskan Muhammadiyah di wilayah Yogyakarta serta bidang-bidang yang dijalankannya mencakup bidang sosial, dakwah, religius, dan pendidikan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian dari Abu Su'ud yakni sama-sama melihat Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu wilayah penelitian dari Abu Su'ud berfokus di Yogyakarta sedangkan penelitian ini berfokus di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketujuh, penelitian Fatma dan Alfabri Rasyid dalam jurnal *Criksetra* menjelaskan sejarah perkembangan Muhammadiyah secara singkat mulai dari berdirinya Muhammadiyah di wilayah Sekayu dan Perkembangannya.¹⁷ Kesamaan dengan penelitian Fatma ini adalah sama-sama membahas Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, terdapat perbedaan yakni tidak ada penjelasan lebih mendalam tentang Muhammadiyah di Sekayu hanya seputar perkembangan singkat yang kemudian menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana proses masuknya, proses perkembangannya. Belum adanya pendalaman tentang Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin membuat penelitian ini menjadi bersifat eksploratif tentang mengungkap sejarah perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan sebagai data utama adalah sebagai berikut: *Pertama*, buku dari Jeroen Peeters yang berjudul *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, *kedua*, buku dari Alfabri Rasyid, dkk., berjudul *Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Selatan*, dan yang terakhir adalah buku *Profil Muhammadiyah 2000*. Sementara itu, data sekunder adalah dari buku-buku, jurnal, artikel dan arsip lainnya yang juga berkenaan dengan Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan teori perkembangan dari Weberian yang menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat merupakan perkembangan yang linier, dari masyarakat yang percaya akan mistik ke arah masyarakat yang rasional. Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian sejarah dengan empat tahapan yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan

¹⁶ Abu Su'ud, *Islamologi: Sejarah Ajaran dan Perananannya dalam Peradaban Umat Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 20.

¹⁷ Fatma dan Alfabri Rasyid, "Perkembangan Muhammadiyah Di Kecamatan Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Criksetra* Vol. 5, No. 10, (tahun 2016), h. 180.

historiografi. Kajian ini juga berfokus pada perkembangan Muhammadiyah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan melihat peran Muhammadiyah di masyarakat.

D. PEMBAHASAN

Terdapat banyak aspek mempengaruhi Muhammadiyah yang awalnya berkembang di Jawa hingga sampai ke Pulau Sumatera. Khususnya Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena yang menarik perhatian yakni mengenai proses masuknya Muhammadiyah dan jalur persebarannya, serta alasan mengapa Muhammadiyah masuk ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Muhammadiyah di Kabupaten MUBA, yang memiliki keterkaitan dengan fenomena perkembangan awal Muhammadiyah di kawasan Sumatera Selatan. Serta, akan dipaparkan guna mengungkap khazanah keilmuan sejarah Islam lokal.

1. Proses dan Faktor yang mempengaruhi masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada awalnya persebaran Muhammadiyah hanya seputar di wilayah Jawa saja. Namun, sekitar tahun 1925 M, Muhammadiyah pertama kali mulai masuk ke Sumatera tepatnya di Minangkabau di bawa secara individu oleh H. Abdul Karim Amrullah. Sebenarnya tidak mengherankan mengapa beliau membawa Muhammadiyah secara personal ke wilayah Minangkabau. Hal ini dilatar belakangi oleh hubungan antara H. Abdul Karim Amrullah dengan K. H. Ahmad Dahlan yang merupakan sahabat dekat yang pernah menjadi murid dari Syekh Khatib Al-Minangkabau saat keduanya belajar di Mekah. Melihat latar belakang tersebut, dapat terlihat jelas bahwa keduanya memiliki pemahaman yang sama baik dalam praktik religius ataupun dalam gerakan pembaharuan dunia Islam.¹⁸ Persebaran ini berlanjut ke wilayah pedalaman Sumatera yakni di sisi Selatan Bukit Barisan. Bila dilihat bagaimana perkembangan Muhammadiyah yang ada di Sumatera dengan Muhammadiyah yang ada di Jawa. Mari memulai perjalanan historis ini dengan melihat wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Konsentrasi Muhammadiyah di wilayah ini adalah di daerah Sipirok, Sibolga, Padangsidempuan, dan Minangkabau, menunjukkan kohesi yang kuat antara gerakan pembaharuan ini dengan wilayah Bukit Barisan. Muhammadiyah berkembang baik di wilayah dataran tinggi yang sejuk dan tanah berbukit di kedua belah sisi Bukit Barisan. Sedangkan di sisi Timur yakni wilayah dataran rendah merupakan pusat atau basis organisasi ortodoks-konservatif. Peeters menjelaskan bahwa terdapat

¹⁸ Muhamad Iqbal, dkk., "Sejarah Keberadaan Muhammadiyah di Minangkabau Perspektif Hamka dalam Karya "Ayahku", *Jurnal Studi Al-Quran*, Vol. 14, No. 1, (Tahun. 2018), h. 84.

benturan antara gerakan reformasi di wilayah Bukit Barisan dengan organisasi ortodoks-konservatif yang ada di wilayah Timur (pesisir). Pergolakan ini dijelaskan sebagai alasan persebaran yang bersifat makro dari Muhammadiyah yang ada di Sumatera. Kemudian, Peeters kembali menjelaskan bahwa tidak hanya sebatas alasan geografis semata yang membuat Muhammadiyah berkembang di pedalaman Sumatera. Wilayah pesisir di Timur seperti Jambi, Palembang dan bermuara di Lampung merupakan pusat dari organisasi ortodoks-koservatif yang dalam hal ini menentang gerakan dari Muhammadiyah.¹⁹ Keadaan yang sama dapat dijumpai di wilayah Selatan Bukit Barisan yakni di Bengkulu misalnya. Dapat ditemukan konsentrasi besar cabang Muhammadiyah di Kepahiang, Bintuhan dan Curup. Sementara itu, di Keresidenan Palembang sendiri terdapat serangkaian cabang organisasi di wilayah Timur Bukit Barisan yaitu di Hulu Enim, Ogan dan sekitaran Danau Ranau. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas mengenai persebaran Muhammadiyah, dapat dilihat ke wilayah Selatan lagi, ditemui pola yang sama yakni di Lampung. Sesudah tahun 1926 M barulah di bentuk kelompok di wilayah pedalaman seperti Menggala, Bandardewa, Panumangan, Gunung Terang, Negara Ratu, Labuhan Ratu dan Labuhan Maringgal. Pola yang sama dimaksudkan oleh Peeters yakni bahwa gerakan reformasi ini di Sumatera selalu bermula pada pedalaman kemudian baru berkembang ke daerah perkotaan dengan memainkan perannya tersendiri.²⁰

Berlanjut mengenai proses masuknya Muhammadiyah ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, tidak terlepas dari jalur persebaran Muhammadiyah di wilayah pedalaman Sumatera yakni di sisi Selatan Bukit Barisan.²¹ Setelah konsentrasi cabang Muhammadiyah berdiri di wilayah Bengkulu, lalu Muhammadiyah masuk ke daerah Sumatera Selatan tepatnya di pedesaan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Muhammadiyah yang berdiri di Sekayu ini merupakan Muhammadiyah tertua yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Bila dihubungkan dengan pola yang dijelaskan oleh Peeters bahwa basis persebaran selalu bermula pada wilayah pedalaman, hal ini sesuai dengan kondisi geografis sebab daerah Kota Sekayu termasuk daerah pedalaman dan bukan daerah pesisir.

Faktor lain yang juga mempengaruhi mengapa Muhammadiyah masuk ke wilayah Sekayu terlebih dahulu dari pada daerah perkotaan. Hal ini disebabkan bahwa wilayah pesisir seperti Jambi dan Palembang merupakan pusat organisasi ortodoks-konservatif yang tentu Muhammadiyah akan mengalami kesulitan jika harus memaksakan berkembang dengan kondisi seperti itu.²²

¹⁹ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, terj. Sutan Maimoen (Jakarta: INIS, 1997), h. xvii.

²⁰ *Ibid.*, h. xvii.

²¹ *Ibid.*, h. xviii.

²² *Ibid.*, h. xix.

Selain itu terdapat beberapa alasan lain mengenai mengapa secara sosial dan kebudayaan, Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Melihat bahwa kondisi sosial dan adat setempat juga berpengaruh pada pola perkembangan Muhammadiyah yang ada di Sumatera Selatan. Maka penelitian ini juga memperhatikan aspek sosial. Kondisi sosial masyarakat di wilayah Kab Musi Banyuasin ini tergambar pada penjelasan mengenai Islamisasi yang dilakukan pada wilayah *Iliran* Palembang. Pada wilayah *Iliran*, sebenarnya sudah terjadi proses Islamisasi secara mendalam, bahkan dapat mengubah pola ikatan genealogis diganti dengan ikatan umat Islam, sehingga mentalitas lama sudah lenyap dan perkawinan antar anggota *dusun* tidak lagi dianggap tabu.²³ Dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh Islamisasi akan mengubah pola perspektif suatu masyarakat, namun hal semacam ini hanya terjadi di wilayah *Iliran* saja.

Islamisasi yang terjadi di *Iliran* menjadikan gerakan pembaharuan yang dibawa oleh Muhammadiyah menjadi mudah di terima oleh masyarakat setempat. Selain itu, latar belakang Islamisasi di wilayah *Iliran* dapat membantu menjawab fenomena mengapa Muhammadiyah mendirikan cabangnya di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, rasanya perlu dikaji juga mengenai kondisi geografis dengan faktanya bahwa bila melihat Kota Sekayu merupakan *center* antara Palembang, Jambi dan Bengkulu, menjadikan wilayah ini wilayah yang strategis bila nantinya Muhammadiyah ingin melakukan relasi kedaerah-daerah lainnya.²⁴

Sementara itu, perlu meninjau bahwa Muhammadiyah dibawa oleh para *kaum mudo* sebagai implementasi gagasan pembaharuan. Muhammadiyah masuk ke wilayah Sekayu, tampaknya terlebih dahulu memasuki wilayah Kepahiang (Bengkulu). Meskipun data awal seputar Muhammadiyah di Sekayu adalah pemberitaan dari koran *Pertja Selatan*, menariknya gerakan *kaum mudo* yang sudah sangat intens di Kepahiang tampaknya menjadi alasan yang paling tepat mengapa Muhammadiyah bisa masuk ke wilayah Sekayu. Selain dari faktor geografis antara Sekayu dan Bengkulu yang tergolong dekat, dualisme antara *kaum tuo* yang berpusat di Kota seperti Palembang dan Jambi menjadikan gerakan modernis (*kaum mudo*) berfokus pada wilayah pedalaman.²⁵ Jadi, bila digambarkan bahwa peta persebaran awal Muhammadiyah di Sumatera yakni berawal di Minangkabau, kemudian berlanjut ke sisi bukit barisan hingga sampai ke Bengkulu. Persebaran Muhammadiyah tampaknya memang berpusat pada pedalaman Sumatera, hingga akhirnya setelah menyebarnya Muhammadiyah di wilayah Kepahiang baru kemudian

²³ *Ibid.*, h. 88.

²⁴ Katalog BPS Kabupaten Musi Banyuasin, *Musi Banyuasin dalam Angka 1998*, h. 2.

²⁵ Jeroens Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942...*, h. xix.

Masuk ke wilayah Sekayu sebagai center dari tiga wilayah besar yakni Palembang dan Jambi sebagai wilayah ortodoks-konservatif dan Bengkulu sebagai wilayah modernis.²⁶

Selanjutnya, mengenai perkembangan awal Muhammadiyah yang ada di wilayah Kabupaten MUBA. Muhammadiyah masuk ke kawasan pedesaan yang tentu secara kultur masih sangat tradisonal baik itu secara pemikiran ataupun secara sosial pendidikan. Dakwah kultural menjadi senjata utama yang digunakan Muhammadiyah untuk menyebarkan dakwah Islam, yang dalam hal ini dakwah kultural yang di maksud adalah bagaimana Muhammadiyah melakukan adaptasi pada masyarakat dengan berdakwah menggunakan bahasa daerah setempat sehingga dapat menembus segala aspek dimensi lapisan masyarakat.²⁷ Faktor lain yang menjadi pendukung perkembangan Muhammadiyah di wilayah sekayu ini adalah dengan menjadi jalur lalu pedagang.²⁸ Khususnya di wilayah Ulak Paceh, daerah ini merupakan daerah yang tergolong dekat dengan Sungai Musi sehingga dapat dipastikan bahwa adanya kegiatan interaksi perdagangan yang berdampak pada kemajuan Muhammadiyah di daerah ini, sebab pada masa tersebut Sungai Musi memang digunakan sebagai jalur transportasi utama. Diketahui bahwa tahun 1926 sudah berdiri cabang Muhammadiyah di wilayah pedesaan sekayu tepatnya di desa Ulak Paceh. Meskipun tokoh-tokoh pertama kelahiran Muhammadiyah di wilayah Sekayu ini tidak diketahui, namun tampaknya besar kemungkinan persebaran Muhammadiyah ke wilayah ini juga di dorong oleh orang-orang dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dengan rentang jarak dua tahun tersebut Muhammadiyah hanya memiliki tiga wilayah yang menonjolkan konsentrasi besar yaitu wilayah Minangkabau, Bukit Barisan dan Bengkulu. Selain itu, persebaran Muhammadiyah di wilayah Bengkulu ini umumnya dialakukan oleh para pedagang dari Sumatera Barat yang juga berperan sebagai *Mubaligh*.²⁹

2. Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten MUBA akan dibagi ke dalam dua periode yakni masa sebelum kemerdekaan (1926-1945), dan masa sesudah kemerdekaan (1946-1998). Tujuan utama dalam pembagian ini adalah untuk bisa melihat pola perkembangan Muhammadiyah. Periodisasi ini berdasarkan data yang didapat dan untuk melihat perkembangan yang terjadi pada organisasi Muhammadiyah. Pada masa sebelum kemerdekaan akan menjelaskan

²⁶ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942...*, h. 144.

²⁷ M. Raihan Febriansyah, dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Yogyakarta, 2013), h.17-18

²⁸ Katalog BPS Kabupaten Musi Banyuasin, *Musi Banyuasin dalam Angka 1998*, h. 2-4.

²⁹ Nurholis, "Sejarah Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2015", *Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), h. 61-77.

perkembangan awal Muhammadiyah yakni pada masa kolonialisme dan kependudukan Jepang. Sementara itu, pada masa sesudah kemerdekaan akan menjelaskan Muhammadiyah pada dua periode yakni masa orde lama dan orde baru. Selain itu, pembagian ini akan mempermudah dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten MUBA.³⁰

- ***Masa awal perkembangan Muhammadiyah (1926-1945)***

Sekolah Muhammadiyah pertama yang berdiri di wilayah pedesaan Kota Sekayu, menjadi alternatif lain dalam perkembangan dunia pendidikan di Palembang.³¹ Hal ini mengacu pada model dan sistem yang diadopsi oleh Muhammadiyah dengan melakukan transformasi pada sistem pendidikan dan kelembagaan dengan memasukkan nilai keislaman di dalamnya. Konsep semacam ini didapat oleh K. H. Ahmad Dahlan yang mengamati model pendidikan *ala* Barat dengan pendidikan Islam yang tertinggal cukup jauh. Beliau juga memiliki pengalaman dalam mengajar di sekolah kolonial dan ilmu keislaman yang kuat sebab pengalaman beliau yang pernah belajar di Mekkah selama dua periode.³²

Melihat dari sisi Islam, bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional yang sebelumnya telah berkembang, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam dalam bentuk pengajian atau berbentuk Pesantren yang berada di daerah *Uluan*, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Sehingga tiap pemuka-pemuka mau tidak mau harus

³⁰ Periodisasi atau pembabakan waktu merupakan suatu proses strukturalisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Dengan banyaknya peristiwa masa lampau mengharuskan sebuah penulisan sejarah yang tertata secara rapi agar dapat dinikmati dan mudah dipahami. Periodisasi ini merupakan konsep penyederhanaan untuk memudahkan klasifikasi terutama dalam penelitian ilmu sejarah serta untuk bisa mengetahui sejarah secara kronologis. Untuk lebih jelas lihat M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 53.

³¹ Gambaran awal mengenai pendidikan masa kolonial Belanda. Pada wilayah Keresidenan Palembang sendiri hanya terdapat Sekolah Dasar sampai ketinggian Sekolah Lanjutan Pertama (MULO : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Sekolah Dasar menggunakan bahasa pengantar yakni bahasa Belanda dan ada pula yang menggunakan pengantar bahasa Melayu. Pada awal abad ke-28 khususnya di wilayah MUBA (*Onder Afdeeling Musi Hilir* dan *Onder Afdeeling Banyoeasin*), hanya terdapat jenis Sekolah Dasar saja yang termasuk kategori sekolah Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*) yang dibiayai oleh pemerintah Marga setempat. Pemuka agama setempat juga mengelola sekolah agama setingkat dengan Sekolah Dasar (*Ibtida'iyah*) yang terdapat di beberapa dusun. Berdirinya Sekolah Dasar (*Government*) di wilayah ini yang lazimnya disebut Sekolah Desa, memiliki hubungannya dengan pasal 1 Surat Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) pada tanggal 28 September tahun 1892 Nomor 44 (Lembaran Negara 1893 Nomor 125), yang membagi Sekolah Negeri Bumiputera ke dalam dua kategori : yakni Sekolah Kelas Satu (*De Scholen der Eerste Klasse*) dan Sekolah Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*). Lihat IKPM MUBA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin*, (Sekayu: T.pn., 2016), h. 14-15.

³² K. H Ahmad Dahlan pernah belajar di Mekkah sebanyak dua kali. Tahun pertama adalah 1890 M/ 1307 H dalam periode pertama ini beliau hanya menetap selama setahun. Kemudian barulah pada tahun 1903 M/ 1320 H beliau kembali berangkat dan menetap selama dua tahun untuk kembali mendalami ilmu-ilmu ajaran Islam. Lihat Dja'far Siddik, "Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara", *Jurnal of Contemporary Islam and Muslim Societies* Vol. 1, No. 1 (Januari- Juni 2017), h. 4.

berupaya untuk meninjau kembali isi dari kekayaan aqidah dan agamanya. Kemunduran dan kefanatikan yang menyelubungi masyarakat Islam ini yang didominasi oleh *kaum tuo*.³³

Berdasarkan data sejarah gerakan dakwah Muhammadiyah ini memang sudah mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Perkembangan awal Muhammadiyah di wilayah Kabupaten MUBA tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh Muhammadiyah itu sendiri. Tokoh yang berperan dalam perkembangan awal Muhammadiyah, antara lain: M. Sholah, H. Muchtar, M. Senin Yakub, H. Yasin Yazid, H. Abdullah Azhari, H. Tolib dan Romli Nur. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh perintis awal Muhammadiyah di pusat Kota Sekayu pada tahun 1935, yang sangat penting dalam mengembangkan Muhammadiyah di Kabupaten MUBA, peran besar tersebut dapat dilihat hingga sekarang bahwa Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar di wilayah Kabupaten MUBA.³⁴

Selain dari peran tokoh daerah setempat, peran dari luar pun rasanya perlu dilihat yakni dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) Yogyakarta antara lain Dahlan Mughoni dan A. R. Fahrudin keduanya ditugaskan di wilayah Kabupaten MUBA. Adanya tokoh dari PPM Yogyakarta menjadikan Muhammadiyah di wilayah MUBA cukup cepat menyebar. Walaupun begitu, dari segi organisatoris organisasi Muhammadiyah belum terorganisasi sehingga kegiatan dakwahpun masih bersifat perorangan.³⁵

Berlanjut mengenai Muhammadiyah di wilayah MUBA, bahwa sekolah Muhammadiyah pertama di wilayah Kabupaten MUBA sempat di tutup selama empat bulan oleh pihak kolonial.³⁶ Sehingga kegiatanpun ikut tertunda namun penutupan sekolah ini berakhir setelah turunnya perintah untuk kembali dibukanya sekolah Muhammadiyah ini.

Hal semacam ini tentu menguatkan fakta sebelumnya bahwa memang terjadi ketegangan antara organisasi Muhammadiyah dengan pihak kolonial Belanda. Hingga dapat diperkirakan

³³ Istilah *kaum tuo* ini tujuannya untuk para ulama atau pemimpin agama yang mendapat ilmu keagamaan secara tradisional dari orang tuanya. Biasanya merupakan ulama sesepuh atau penasehat pada zaman Kesultanan Palembang. Mereka dikenal dengan pendirian kolot. Sementara itu istilah *kaum mudo* digunakan pada ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agama melalui pendidikan modern, dengan masuk pesantren atau dari organisasi-organisasi politik yang berpandangan modern, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Sarekat Islam dan sebagainya. Pada lingkup mencari pengaruh dua golongan ini sering didapat perbedaan, namun pada tingkat ajaran keduanya sepakat sama. Selain itu, penggunaan istilah *kaum tuo* dan *kaum mudo* dikaitkan pada kehidupan masyarakat di wilayah pedusunan. Sekelompok orang-orang yang menamakan dirinya *kaum mudo* akan memisahkan diri dari golongan adat. Hal ini diakibatkan oleh para kelompok *kaum mudo* menghendaki adanya pembaharuan serta perubahan yang tidak terikat dengan tradisi yang bertentangan dengan syari'at, ajaran, serta nilai-nilai Islam. Namun, nyatanya *kaum tuo* yang dianggap sebagai orang yang lebih dihormati relatif lebih banyak pengikutnya daripada *kaum mudo*. Lihat dalam Jaroen Peeters. 1998. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang, 1821-1942*. Jakarta: INIS. Lihat juga IKPM MUBA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin...*, h. 56.

³⁴ Alfabri Rasyid, dkk., *Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Selatan*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2010), h. 256-257.

³⁵ *Ibid.*, h. 257.

³⁶ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942...*, h. 144.

bahwa gerakan ini memiliki hambatan pada aspek politik yang dilakukan oleh kolonial untuk mencegah agar gerakan-gerakan Islam tidak mengancam eksistensi Keresidenan kala itu. Pada masa ini konsentrasi Muhammadiyah Mengacu kepada dua hal yakni aspek pendidikan dan praktek keagamaan di wilayah Kabupaten MUBA. Pertama aspek pendidikan, Muhammadiyah melihat bahwa hal yang sangat dibutuhkan adalah pendidikan sebab pendidikan pada masa itu tergolong sulit bahkan tidak sedikit masyarakat yang asing dengan dunia pendidikan. Pendidikan menjadi solusi terhadap perbaikan keilmuan serta moral generasi selanjutnya, dan respon terhadap kebijakan belanda yang membedakan kelas pribumi dan bangsa kolonial.³⁷

Muhammadiyah masuk di wilayah Kabupaten MUBA yakni pada tahun 1926 M bersamaan dengan berdirinya sebuah sekolah Muhammadiyah di wilayah pedesaan tepatnya di desa Ulak Paceh.³⁸ Pada awal perkembangannya Muhammadiyah tentu tidak langsung menjadi sebuah organisasi besar, perlu adanya proses baik itu adaptasi dengan lingkungan ataupun dengan kebudayaan setempat agar dapat menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan Muhammadiyah di sana. Sementara itu, di pusat Kota Sekayu pada tahun yang sama berdiri juga Sekolah Islamiyah.³⁹

³⁷ Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan penjajah. Sehingga pendidikan pada masa ini dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang digunakan sebagai alat memperkuat kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Namun, sifat pendidikan semacam ini mulai berubah pada abad ke-20. Hal ini disebabkan lahirnya Politik Etis (*Etische Politiek*) yang dikemukakan oleh Van Deventer. Secara umum sekolah pada masa kolonial dibagi menjadi Pendidikan dasar yang kembali terbagi menjadi pendidikan dasar dengan bahasa pengantar yakni bahasa Belanda dan bahasa Daerah. Kemudian untuk yang bersekolah di Sekolah Desa (Sekolah Dasar dengan bahasa pengantar bahasa Daerah) berlanjut ke Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) dan lanjut ke Sekolah Peralihan (*Schakeschool*). Selanjutnya, Pendidikan Menengah Umum terbagi menjadi MULO (*Meer Urgebreid Lager Onderwijs*) kemudian dilanjutkan ke Sekolah AMS dan terakhir HBS (*Hogere Burger School*) yang merupakan sekolah khusus orang Belanda, tetapi terdapat pengecualian untuk anak dari bumi putera yang termasuk bertalenta luar biasa. Lihat Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1993), h. 73.

³⁸ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942...*, h. 144.

³⁹ Pada tahun yang sama juga berdiri Madrasah Islamiyah di pusat Kota Sekayu. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Sekolah pertama yang membawa program pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam di wilayah Palembang adalah Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, yakni pendirian sekolah pada tahun 1925 di buka secara resmi oleh pihak kontrolir Ogan Ilir. Rehabilitasi Islam di wilayah ini mendapatkan dukungan dalam bentuk inovasi yang dipelopori oleh Haji Basri bin H. Yusuf, Haji A. Cholik dan Anang Kirom. Maka pada tahun 1926 berdirilah Madrasah Islamiyah di Sekayu dibawah pimpinan Haji Basri Bin H. Yusuf. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantara yang diterapkan di lembaga pendidikan formal ini memberikan pelajaran agama dan pengetahuan umum dari tingkat *Ibtida'iyah* sampai ke tingkat *Aliyah*. Kemudian di Dusun Tanah Abang didirikan pula sekolah semacam ini yang dipimpin oleh Haji. A. Cholik. Dengan kurun waktu yang hampir bersamaan atas usaha dari Anang Kirom, berdiri lagi Madrasah Islamiyah di Dusun Teluk Marga Epil. Setelah Madrasah Islamiyah di Sekayu menghasilkan murid-muridnya yang terpilih seperti : H. Thohib, romli, Abdul Kadir Djamain, Hasan bin H. Yusuf, Cholik bin Goffar, H. Abdulhamid, Amir hamyah, dan lain-lain. Di antara mereka itu ada pula yang meneruskan pelajarannya kesemanajung Melayu (Singapura dan Johor). Maka dengan perantaraan mereka itu Islam mulai menyentuh daerah-daerah yang terpencil di dalam wilayah *Onder Afdeeling* Musi Hilir dan *Onder Afdeeling* Banyuasin. Lihat dalam Jeroens Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942...*, h. 151. Lihat juga IKPM MUBA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin*, (Sekayu: T.pn., 2016), h. 18.

Seiring dengan berkembangnya Muhammadiyah di wilayah lain seperti di Kota Palembang menjadikan gerakan Muhammadiyah MUBA semakin intens. Sekitar Tahun 1930-an ke atas Muhammadiyah berkembang tidak hanya seputar wilayah MUBA saja, tetapi sudah meluas ke daerah lain dengan begitu akan semakin banyaknya gerakan pembaharuan berdampak pada lebih terorganisirnya organisasi Muhammadiyah ini.⁴⁰ Hingga menjelang kemerdekaan sekitar tahun 1940 sampai tahun 1944 Muhammadiyah di MUBA semakin eksis dengan semakin banyaknya lulusan-lulusan dari sekolah Muhammadiyah yang menjadi kader Muhammadiyah yang baru dalam mengemban tugas menjalankan visi dan misi Muhammadiyah.

Berkembangnya lembaga Pendidikan Islam di wilayah ini adalah hasil dari upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan tujuan memperkuat pengaruhnya di tengah masyarakat. Kemudian, pada tahun 1933 organisasi Muhammadiyah kembali mendirikan cabangnya di wilayah di Ulakpaceh, dan pada tahun 1937 Madrasah Islam didirikan di Air Itam oleh H.Abdul Hamid dan kawan kawan. Wilayah ibukota *Onder Afdeeling* Musi Hilir terdapat banyak lembaga pendidikan Islam seperti, pada tahun 1933/1934 berdiri Madrasah Attawuniah oleh K. H. Mustopa pada tahun 1937/1938 di sekolah agama yang setingkat *Schakel School* oleh Syamsul Hamid dan Rozali Rozak. Pada tahun 1939 berdiri Schakel School Muhammadiyah oleh Tuan Semsun dan pada tahun 1940 berdiri Dharul Ulum oleh K. H. Moh. Noer di dusun Lumpatan berdiri pula Madrasah Al Mahaddudin pada tahun 1939 oleh KH.Amir Hamzah dan kawan kawan. Rentang waktu antara tahun 1930 sampai tahun 1942 dapat ditemui setiap dusun memiliki sekolah-sekolah agama, yang dikelola oleh orang-orang yang berorientasi pada kedua faham tersebut.⁴¹

Melihat perkembangan lembaga pendidikan di wilayah Musi Hilir pada tahun 1930 sampai tahun 1942 dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia pendidikan mencapai tahap penyebaran yang cukup luas, terlepas dari bagaimana latar belakang terbentuknya lembaga pendidikan tersebut. Bila di bandingkan dengan proses perkembangan awal Muhammadiyah di *Onder Afdeeling* Musi Hilir yakni pada tahun 1926 sampai 1930-an, terdapat perbedaan yang mencolok. Muhammadiyah yang awalnya terbentuk akibat dari respon terhadap keadaan masyarakat yang melakukan penyimpangan akidah Islam dan terlihat dominan pada dakwah islam secara individual. Kemudian keadaan ini berubah pasca tahun 1930-an fokus perkembangan terlihat menonjol pada lembaga pendidikan yang tergambar berdasarkan fakta telah banyak munculnya lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah ini.

⁴⁰ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942...*, h. 7-9.

⁴¹ IKPM MUBA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin*, (Sekayu: T.pn., 2016), h. 19.

Melihat kondisi perkembangan kelembagaan dan pendidikan di era Keresidenan Palembang, fenomena mengenai Muhammadiyah cukup menarik. Muhammadiyah yang merupakan gerakan modernis mewakili kaum mudo sedangkan dari sisi tradisional (*kaum tuo*) terdapat lembaga pendidikan Al-Ihsan, Aliyah Diniyah, Quraniyah dan lain sebagainya.⁴² Meninjau lebih jauh, di wilayah Musi Hilir khususnya dipusat Kota Sekayu, juga terdapat sekolah kaum tradisional. Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan modernis (*kaum mudo*) berpusat di sisi pedesaannya (Ulak Paceh). Tampaknya, kaum tradisional selalu memilih pusat kota untuk perkembangannya⁴³ sedangkan Muhammadiyah menjadikan pedesaan sebagai basis pusat persebarannya dan respon dari dominasi *kaum tuo* di wilayah perkotaan.

Namun, keadaan tersebut berubah setelah masa pendudukan Jepang. Hampir semua ibukota Marga (*Son*) dan dusun-dusun yang padat penduduk didirikanlah sekolah sambungan (*Koto-Syogakko*), sehingga bagi mereka yang berkeinginan melanjutkan pelajarannya tidak perlu lagi ke ibukota Marga.⁴⁴ Tetapi, kondisi berubah pada jaman pendudukan Jepang 1942-1945, semua lembaga pendidikan Islam di daerah ini tanpa kecuali dibubarkan oleh penguasa Jepang. Hal ini tentu sangat berdampak pada kondisi pendidikan dan terganggunya segala aktivitas yang berkaitan. Sebenarnya pada masa peralihan ini perkembangan sedang melaju pesat, kondisi yang sangat memprihatinkan ini secara tidak langsung juga berdampak pada pola perkembangan Muhammadiyah di wilayah Musi Hilir.⁴⁵

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada masa pendudukan Jepang coba menarik perhatian dan menciptakan kesan yang baik agar memiliki dukungan demi kepentingan Perang Dunia II (dua). Hal ini berdasarkan tindakan Jepang yang menutup semua lembaga pendidikan berbasis Islam, ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi gerakan-gerakan pemberontakan. Kemudian, pasca meletus Perang Dunia II, sekolah Leergang yang menjadi tempat mendidik kader-kader guru Sekolah Desa, didirikan kembali di ibukota Babat. Sehingga di daerah ini terdapat dua lembaga pendidikan guru yang sebelumnya hanya satu pada masa kolonial Belanda. Nama sekolah tersebut dirubah yang sebelumnya bernama *Curcus Voor Volks Onderwijzer* (CVD), di ubah menjadi *Kyoing-yo-bei-jo*. Siswa yang di terima oleh kedua lembaga tersebut bersifat terbatas sehingga penerimaan siswa baru tidak dapat dilakukan setiap tahun. Hal ini dikarenakan setiap angkatan harus di selesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu,

⁴² Ismail, "Peran Kaum Muslim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Palembang Pada Era Kolonial", *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* Vol. 3 No. 1 (Januari-Maret 2005), h. 81.

⁴³ Kota Sekayu merupakan ibukota Onder Afdeeling Musi Hilir (Peta Wilayah Keresidenan Palembang). Lihat Kemas A. R. Panji dan Sri Suriana, "Sejarah Keresidenan Palembang", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* Vol. 14 No. 2 (Tahun 2014), h. 5.

⁴⁴ IKPM MUBA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin...*, h. 15.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 17.

selelah dua tahun barulah dapat penerimaan siswa baru dapat dibuka. Pasca mereka menyelesaikan pendidikan tersebut, biasanya mereka ditugaskan untuk menjadi guru bantu di sekolah-sekolah yang ada di desa. Meskipun terdapat lembaga Pendidikan Guru sebelumnya guna memenuhi kebutuhan tenaga guru yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang ada di desa, faktanya upaya ini masih belum mencukupi, sehingga siswa yang diterima harus dibatasi mengikuti daya tampung yang hanya berkisar tiga lokal saja, atau tidak ada kelas yang paralel.⁴⁶

Jadi, secara umum kondisi perkembangan Muhammadiyah pada Jepang dapat dikatakan mengalami stagnan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penutupan sekolah dan kebijakan pemerintah Jepang yang selalu mengarkan kebijakan pada kepentingan Perang Dunia II. Namun, kondisi berbeda ditunjukkan pada aspek spritual dan kegiatan keagamaan yang terjadi di masyarakat. Dakwah semakin intens dilakukan selain untuk menyebarkan dahwah Islam juga menanamkan semangat juang.

- ***Perkembangan Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan***

Pasca kemerdekaan ini kondisi perkembangan Muhammadiyah di wilayah Kabupaten MUBA semakin subur. Selain dari faktor kemerdekaan yang menjadikan persebaran Muhammadiyah menjadi lebih luas, tentu pembangunan dan strukturisasi Muhammadiyah menjadi semakin rapi. Namun, meskipun kebebasan dan keluasan dalam melakukan pembaharuan tidak dibatasi lagi, Muhammadiyah tetap konsisten dan fokus pada tujuan awal pembentukannya yakni menyebarkan dakwa Islamiah.

Muhammadiyah di wilayah sekayu pada masa awal kemerdekaan kembali membuka sekolah-sekolahnya yang sebelumnya pernah ditutup oleh pemerintahan Jepang. Pembukaan kembali sekolah-sekolah Islamiah di wilayah sekayu merupakan upaya untuk mengembalikan eksistensinya di wilayah ini. Muhammadiyah khususnya kembali melakukan kegiatan pada pusat-pusat kelembagaannya yakni di wilayah pedesaan Ulak Paceh.⁴⁷ Akhirnya pada tahun 1951 berdirilah Sekolah Muhammadiyah perta di wilayah sekayu yakni sekolah SMP Muhammadiyah 1 dan disahkan berdasarkan Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah SK.018 /C/Kep/1./1951. Sejak awal kifrahnya, SMPM 1 telah memiliki gedung sendiri, meskipun masih dalam taraf semi permanen, terdiri dari lima lokal (ruangan), empat ruang belajar dan satu ruang kantor. Berjalan hingga enam tahun kemudian sekolah ini akhirnya ditutup cukup lama. Penyebab dari penutupan sekolah ini adalah adanya pergolakan politik di daerah-daerah yang menentang pemerintahan pusat, tak terkecuali di Kota Sekayu.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, h. 16.

⁴⁷ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942....*, h. 143-145.

⁴⁸ Alfabri Rasyid, dkk., *Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Selatan....*, h. 259.

Tampaknya perkembangan Muhammadiyah pasca kemerdekaan sampai sekitar tahun 1950-an masih seputar dakwah intens dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tidak terlalu banyaknya pendirian cabang dan sekolah Muhammadiyah. Namun, cabang dan sekolah Muhammadiyah yang sudah ada mengalami perkembangan pesat dengan semakin banyaknya siswa yang bersekolah disana. Pada praktek pribadatanpun, semakin sering adanya pengajian dan pertemuan membahas akidah Islam.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pasca berdirinya PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) wilayah MUBA. Tampaknya, dengan adanya PDM di wilayah MUBA menjadi perkembangan Muhammadiyah menjadi semakin mengakar, hal ini terlihat dengan banyaknya berdiri PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) di wilayah MUBA. PDM di wilayah MUBA berdiri pada tahun 1977, diresmikan berdasarkan SK.PWM. No.F.052/D-2/1977. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1397 H/19 Februari 1977 M.⁴⁹ Berdirinya PDM wilayah MUBA, selain sebagai kondinator utama dalam melihat perkembangan PCM di wilayahnya tentu memiliki tujuan utama yakni penghubung antara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang ada di Palembang dan menjadi jembatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM). Hal ini tentu menjadi upaya yang dilakukan agar dalam memperbaiki keorganisasian Muhammadiyah. Hingga akhir abad ke-20-an Muhammadiyah terus berkembang dengan luas dann telah mencapai hampir seluruh wilayah di Indonesi. Berdasarkan Profil Muhammadiyah wilayah Sumatera Selatan dari berdiri sampai akhir abad ke 20-an setidaknya terdapat 11 (sebelas) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang tersebar di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Pada tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) khususnya di wilayah Kabupaten MUBA, terdapat 5 (lima) PCM yang berada di Sekayu, Ulak Paceh, Teluk, Pangkalan Balai, Mekarti Jaya.

3. Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Amal usaha Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi empat bidang yakni bidang ekonomi, bidang dakwah dan kesejahteraan sosial, bidang politik serta bidang pendidikan.

- Bidang Ekonomi

Muhammadiyah secara terus-menerus merumuskan dan merivitalisasi perannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban, berkeadilan, serta berdaya secara

⁴⁹ *Ibid.*, h. 257.

ekonomi. Atas semangat serta tekad tersebut yang tercermin dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah yang telah dikembangkan, walaupun memiliki kendala dalam perkembangan selanjutnya dan belum sepenuhnya terjalankan dengan baik disebabkan oleh berbagai macam kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi, namun Muhammadiyah tetap memiliki semangat dalam gerakan reformasi pembaharuan dalam bidang ekonomi.⁵⁰

Tampaknya, di wilayah Kabupaten MUBA Muhammadiyah juga menjalankan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan demi menekan perbaikan dalam bidang kesejahteraan umat. Hal ini dapat dilihat bahwa pada awal pendirian PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) sekitar tahun 1974, majelis ekonomi sudah menjadi salah satu dari ketujuh majelis di wilayah Kabupaten MUBA.

Selain itu, bukan hanya majelis ekonomi di PDM saja yang menjadi perhatian. Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) juga memiliki koperasi yang berfungsi sebagai pengelolaan keuangan serta menjalankan ketetapan yang sudah menjadi keputusan Majelis Tarjih Pusat. Koperasi ini menjadi sarana dalam meningkatkan kecerdasan finansial dan pengelolaan dana yang ada setiap PCM ataupun PRM. Lebih jauhnya koperasi juga berperan pada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan sosial-ekonomi masyarakat.

Muhammadiyah dalam perkembangannya menjalankan koperasi yang selain dari anggotanya sendiri juga melibatkan masyarakat dalam upaya dalam memperkuat ekonomi lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan cara menjalankan bantuan (modal) yang tepat sasaran. Koperasi yang dimiliki oleh setiap Pimpinan Cabang Muhammadiyah biasanya mengelola dana yang di himpun dari anggaran atau sumbangan sukarela oleh setiap anggota serta bantuan-bantuan dari pihak luar. Kemudian dana yang sudah terkumpul kembali di kelola dengan cara disalurkan pada anggota atau masyarakat yang memerlukan modal usaha.

Meninjau peran koperasi Muhammadiyah tersebut, menariknya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam juga memasukan nilai-nilai keislaman dalam yang dibungkus dalam konsep perekonomian yang membangun. Meski tergolong tidak terlalu besar bantuan modal usaha, namun terlihat jelas Muhammadiyah di wilayah Kabupaten MUBA setidaknya memiliki peran aktif dalam membangun perekonomian lokal. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam ini merupakan bentuk dakwah yang dilakukan Muhammadiyah pada bidang ekonomi. Semua konsep ekonomi yang dibangun oleh Muhammadiyah ini akan bermuara pada nilai keimanan yang bersandar pada konsep *halal* dan *barokah*.

⁵⁰ Hafizur Rahman, "Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah dalam Modernisasi Ekonomi Masyarakat Islam di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), h. 2.

Kedua konsep tersebut melebur dalam pemahaman masyarakat yang membentuk karakteristik perekonomian di wilayah MUBA. Hingga dapat disimpulkan bahwa antara nilai-nilai keislaman yang dibangun berdasarkan konsep ekonomi syariah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa hal ini merupakan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanamkan nilai keislaman pada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Muhammadiyah memiliki koperasi di setiap Pimpinan Cabang. Hal ini dilakukan Muhammadiyah untuk menunjang keperluan organisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kegiatan koperasi biasanya melakukan bantuan untuk golongan usaha menengah kebawah dan pengelolaan dana kas yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Tersebut.

- ***Bidang Dakwah dan Kesejahteraan Sosial***

Dakwah merupakan istilah keagamaan yang berkaitan dengan penyebaran nilai-nilai keislaman yang paling populer di kalangan kita saat ini. Akan tetapi yang sering terjadi istilah "dakwah" diartikan secara sempit oleh kebanyakan orang sehingga dakwah selalu didentikkan dengan pengajian, khutbah dan arti-arti sempit lainnya. Oleh karenanya istilah dakwah perlu dipertegas artinya.⁵¹

Luasnya pengertian dakwah yang tentunya berbeda-beda pengertiannya menurut banyak ahli. Namun, pada dasarnya definisi dakwah memiliki tiga unsur yang mencakup keseluruhan tersebut. *Pertama* dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain. Hal ini mengacu kepada pendapat Prof. Dr. H. Aboebakar Atjeh dalam bukunya mengatakan "dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik. *Kedua*, dakwah merupakan penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf (ajakan kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah segala bentuk kemaksiatan). Syech Ali Mahfudh dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* yang mengatakan bahwa "dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat". *Ketiga*, dakwah adalah upaya dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Pendapat ini mengutip dari Drs. H. Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah (Islam) termasuk amar ma'ruf

⁵¹ Mohammad Hasan, *Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 8

nahi munkar untuk memperoleh kebahagiaan didunia dan diakhirat.⁵² Sebenarnya mengenai pengertian dakwah ini masih sangat banyak, namun dengan melihat tiga hal di atas cukup untuk melihat dan meninjau dafinisi dakwah secara menyeluruh.

Tampaknya Muhammadiyah sejak awal berdiri merupakan organisasi yang turut serta dalam berbagai macam gerakan-gerakan dakwah sosial. Muhammadiyah juga peduli akan kehidupan sosial masyarakat, bantuan sosial yang dananya digalang dari iuran anggota untuk kepentingan anggota dan masyarakat.

Selain itu Muhammadiyah juga mendirikan sejumlah Masjid, Mushala atau Surau di berbagai daerah merupakan salah satu bentuk dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka menyebarkan Islam di tengah masyarakat. Setiap ranting atau cabang harus ada Masjid atau Mushala diberi dengan nama Taqwa sebagai ciri khas Masjid Muhammadiyah. Dana pembangunan Masjid atau Mushala ini berasal dari infak, sedekah dan sumbangan para dermawan maupun lembaga-lembaga lainnya. Semangat infak warga Muhammadiyah tergolong kuat, hal ini berdasarkan rasa kecintaan jama'ah dengan Muhammadiyah. Pengumpulan infak dan sedekah yang cukup populer ini yaitu Gerakan Amal Shaleh (GAS) yang dalam praktiknya diadakan sebelum kegiatan Mukhtamar, pengajian, ceramah ramadhan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha.⁵³

Amal usaha Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyangkut bidang dakwah Islam, meliputi kegiatan-kegiatan seperti dengan mengadakan pengajian sebulan sekali dengan mengundang pembicara yakni para penceramah Muhammadiyah, baik itu dari dalam wilayah Kabupaten MUBA maupun dari luar daerah. Pengajian ini biasanya bertemakan tentang kajian-kajian keislaman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang nilai keislaman yang dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga ditujukan agar nilai-nilai Islam dapat masuk keseluruh lapisan sosial dan tertanam menjadi kontrol sosial.

- ***Bidang Politik***

Tentu tidaklah salah bila membicarakan relasi Muhammadiyah dengan politik, karena meskipun lahirnya Muhammadiyah tidak dikonstruksi sebagai organisasi politik atau partai politik, namun faktanya Muhammadiyah telah memosisikan diri sebagai “gerakan politik”. Muhammadiyah sendiri tegas menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah *amar makruf nahi munkar*, yang beraqidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunah.

⁵² *Ibid.*, h. 9-11.

⁵³ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural...*, h. 315.

Muhammadiyah berdiri dalam situasi sarat politik, baik konteks politik keagamaan terkait “pertarungan” perebutan pengaruh keagamaan di antara kekuatan keagamaan yang terjadi di dunia Islam (Jazirah Arab) maupun yang ada di Nusantara saat itu. Kondisi politik ini dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap kolonial serta pada pertarungan politik seiring runtuhnya Khilafah Usmaniyah Turki pada Februari 1924.⁵⁴ Terjadi peristiwa gejolak politik untuk menghidupkan kembali khilafah. Tercatat setidaknya ada tiga raja yang saling berebut pengaruh untuk kembali menghidupkan khilafah Islamiyah, yakni Raja Hijaz Syarif Hussein,⁵⁵ Raja Ibnu Sa’ud dari Najed (sekarang Arab Saudi), yang juga musuh besar Hussein,⁵⁶ dan Raja Fuad dari Mesir.⁵⁷ Kecenderungan di Jazirah Arab untuk menghidupkan kembali Khilafah Islamiyah sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh kekecewaannya pada Khilafah Utsmaniyah yang sering menafikan orang-orang Arab.

⁵⁴ Kekhalifahan Utsmaniyah secara *de facto* dibekukan sekitar tahun 1922. Hampir semua pengaruh Khalifah Abdul Madjid terkikis akibat pembekuan ini. Kekhalifahan Utsmaniyah baru secara resmi dihapuskan pada tahun 1924 oleh Mustofa Kemal At-Taturk. Kekhalifahan Utsmaniyah secara efektif dibekukan sekitar tahun 1922. Lihat Miftahul Jannah, “Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924” *Journal of History*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2019), h. 65-66.

⁵⁵ Hussein berkeinginan untuk menghidupkan kembali *khilafah* yang berpusat di Makkah. Kemudian terbentuknya Dewan Penasehat Khalifah yang berisikan dua anggotanya diantaranya berasal dari Asia Tenggara yang bermukim di wilayah Makkah. Hussein juga bermaksud mengadakan Kongres Haji (*Muktamar Al-Hajj*) di Makkah Juli 1924, dengan tujuan untuk mendapatkan suara dan dukungan atas dirinya sebagai *khalifah*. Namun muktamar tersebut gagal untuk mencapai kata sepakat. Lihat Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 28.

⁵⁶ Menurut Ibnu Saud Hussein, hanya terobsesi dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan stabilitas dan kebebasan dunia Arab. Hussein sering dianggap menghalangi Gerakan Wahabi Ibnu Saud (khususnya, Muwahhidin, atau Gerakan Pemurnian Tauhid). Wahabi merupakan gerakan keagamaan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1787) di Najed pada akhir abad ke-19-an. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni, yaitu kembali kepada al-Qur’an dan Hadits, serta membuka lebar-lebar pintu *ijtihad* dan membunuh *taqlid*, *bid’ah*, *khurafat*, dan *tahayul*. Hussein telah dianggap membiarkan ajaran Islam sarat dengan *bid’ah* dan *khurafat*. Terjadi pertempuran antara tentara Ibnu Saud melawan tentara Hussein. Sekitar tahun 1924 Hussein mengalami kekalahan. Hussein akhirnya meninggalkan Hijaz dan kemudian lari ke wilayah Kepulauan Cyprus untuk mengasingkan diri. Syarif Ali, yang merupakan putera Hussein mencoba menggantikan kedudukan ayahnya. Namun akhirnya Ali pun menyerah tahun 1926. Kemudian, mulailah Ibnu Saud melakukan gerakan untuk menghapus segala bentuk kesesatan dalam praktek keagamaan, seperti membongkar kultus bagi orang-orang suci, bangunan-bangunan makam, dan apa saja yang dianggap keramat walau itu makam keluarga Nabi dan Sahabat Khulafaur Rasyiddin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang ada di sekitar Kabah; membuka lebar-lebar pintu *ijtihad* dan membunuh *taqlid* dan mencela habis-habisan mereka yang masih mau tunduk pada madzhab. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 111-137.

⁵⁷ Saat terjadinya pertempuran antara Ibnu Saud dan Hussein, para ulama Al-Azhar secara diam-diam mendapat dukungan dari Raja Fuad sedang mempersiapkan Kongres Khilafah. Kongres ini akan diadakan pada Maret 1925, tetapi memiliki kendala sehingga ditunda hingga Mei 1926. Mendengar Fuad sedang menyiapkan kongres, Ibnu Saud kemudian berupaya membuat kongres tandingan di wilayah Makkah. Dalam pandangan Ibnu Saud, bila Kongres Mesir terlaksana dan Fuad terpilih sebagai *khalifah*, akan menjadi bahaya terhadap posisi yang baru dimengangkannya. Akhirnya kongres tersebut dilakukan untuk tujuan pribadinya, yakni untuk memperoleh legitimasi bagi kekuasaan Ibnu Saud atas Hijaz. Kongres Mesir memutuskan bahwa masalah *khilafah* bagi umat Islam masih cukup penting, guna mengagungkan kalimat Allah dan mempertahankan kebesaran Islam. Namun diakui bahwa *khilafah* dalam arti yang sebenarnya hanya terdapat pada zaman klasik ketika seluruh daerah dapat diikat dalam satu perintah dan satu organisasi. Hasil dari kongres tersebut, hampir mustahil menegakkan tahta *khalifah* kembali. Meski begitu kongres tetap memberikan saran dan gagasan untuk pembentukan *khilafah*. Bahasan tentang hal ini, lihat juga dalam Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 165-167.

Peran Muhammadiyah pada bidang politik di wilayah Kabupaten MUBA terlihat jelas yakni perannya dalam politik kebangsaan. Muhammadiyah menjalankan perannya dengan mengupayakan kegiatan pendidikan dan pengkaderan untuk terbentuknya karakter penerus bangsa. Hingga pada era sebelum kemerdekaan gerakan politik kebangsaan ini semakin intens terbukti dengan semakin banyaknya sekolah-sekolah yang dibuka dan upaya pemberdayaan masyarakat madani khususnya di wilayah Sekayu. Sementara itu pada perkembangan perpolitikan lokal di wilayah MUBA pada era pasca kemerdekaan, Muhammadiyah tampil sebagai pihak ketiga yakni tidak terjun langsung sebagai parpol namun mendukung kegiatan yang bernilai positif dari setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Serta, peran Muhammadiyah semakin terlihat saat Muhammadiyah di Sekayu bergabung dalam bagian dari Masyumi.

Tampaknya Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama dengan organisasi Islam lainnya mengenai politik dan keikutsertaannya mengawal perpolitikan di khususnya di wilayah Kabupaten MUBA. Meski begitu Muhammadiyah menekankan dengan kuat bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak akan terjun pada porsi politik praktis. Masyumi di wilayah Kabupaten MUBA muncul dan mulai berkembang pasca kemerdekaan hingga akhirnya Masyumi dibubarkan.⁵⁸

- ***Bidang Pendidikan***

Muhammadiyah yang sejak berdiri hingga sekarang sangat terkenal dengan perannya pada bidang pendidikan. Bahkan Presiden Soekarno pernah menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah berjasa dalam pengembangan dan kemajuan dunia pendidikan Indonesia.

Pendidikan Muhammadiyah sebagai amal shalih telah dilaksanakan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan anggota lainnya pada bidang pendidikan Muhammadiyah. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah ini mampu bertahan dengan konsep pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Muhammadiyah pada masa itu, merupakan suatu wujud amal shalih. K.H. Ahmad Dahlan mampu menawarkan model pendidikan baru sebagai pembaharuan (*ashlah*) dari pendidikan konvensional sekolah Belanda dan pesantren. Pendidikan Muhammadiyah juga mampu melahirkan generasi baru yang siap

⁵⁸ Partai Masyumi akhirnya menghadapi Keputusan Presiden No.200 tahun 1960 dengan dua cara. *Pertama*, Pimpinan Partai Masyumi menyatakan Masyumi bubar, melalui suratnya No. 1801 BNI-25/60 tanggal 13 September 1960. Partai Masyumi membubarkan diri untuk menghindari cap sebagai partai terlarang, dan korban yang tidak perlu, baik terhadap anggota Masyumi dan keluarganya, maupun aset-aset Masyumi. *Kedua*, menggugat Sukarno di pengadilan. Usaha Masyumi mencari keadilan di pengadilan menemui jalan buntu. Kebuntuan itu terjadi karena adanya intervensi Sukarno terhadap pengadilan. Lihat Abdul Rahman, "Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (Tahun 2017), h. 163.

meneruskan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan telah merumuskan visi dan misi yang sudah jelas, sehingga dapat melahirkan gerakan yang terarah dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan secara bersama. Sebagai sebuah gerakan, tentu dalam perjalanannya Muhammadiyah telah melaksanakan usaha dan kegiatannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia dengan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan hingga akhirnya bisa tetap eksis hingga saat ini.⁵⁹

Berdirinya amal usaha Muhammadiyah memiliki maksud untuk memperjuangkan tujuannya yakni selalu menggalakkan seluruh anggota untuk mencintai dan menyenangi semua kegiatan Muhammadiyah. Karena apabila tidak didukung oleh anggota-anggotanya tentunya cita-cita atau maksud dan tujuan Muhammadiyah tidak akan tercapai dan hanya menjadi wacana semata.⁶⁰

Seperti telah disinggung di atas mengenai pendidikan Muhammadiyah, program yang paling menonjol yakni bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan bidang pendidikan ini berkaitan dengan dimensi sosial kemasyarakatan dan problem pokok utama sejak berdirinya Muhammadiyah di wilayah MUBA pada masa kolonial. Dalam hal ini perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah Kabupaten MUBA identik sejalan dengan perkembangan organisasinya. Telah menjadi ketentuan bahwa untuk membentuk suatu tingkat pengurus organisasi Muhammadiyah, meski hanya tingkat pengurus ranting sekalipun, terlebih dahulu para warga Muhammadiyah harus menyelenggarakan pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, seiring dengan berkembangnya bidang pendidikan, maka secara kelembagaan Muhammadiyah di wilayah MUBA ini juga mengalami kemajuan secara pesat. Sekayu sebagai ibukota Musi Hilir ternyata barulah tahun 1951 yakni SMP Muhammadiyah 1 yang berdiri pada tahun 1951, disahkan berdasarkan Piagam Pendirian Perguruan Muhammadiyah Nomor SK.018./C/Kep/1./1951. Sejak awal pendiriannya SMP Muhammadiyah 1 ini telah memiliki gedung sendiri meski baru bersifat semi permanent. Bangunan tersebut terdiri atas lima lokak (kelas) empat ruang belajar dan satu ruang kantor. Setelah berjalan sekitar enam tahun tepat tahun 1957 SMP Muhammadiyah 1 ini harus ditutup akibat pergolakan politik di daerah-daerah yang menentang pemerintahan pusat, tak terkecuali di Sekayu. Pada masa tersebut Musi Hilir ditumbuhi dengan gerakan Revolusioner Pemerintah Indonesia (RPI) yang berpusat di Sekayu.

⁵⁹ ST Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan Tokoh)", *Jurnal Tarbawi* Vol. 1 No. 2 (Tahun 2016), h. 142-143.

⁶⁰ Isma Asmaria dan Ponirin, "Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2013), h. 101.

Sejak berdirinya hingga tahun 2010 SMP Muhammadiyah 1 telah dipimpin oleh delapan orang Kepala Sekolah yaitu 1951-1964 adalah Bakrie Rasyid. Selain sebagai pendidik Bakrie Rasyid juga merupakan generasi pertama Tokoh Muhammadiyah di Sekayu. Pada periode kedua yakni Cek Rani Aziz yang memimpin pada tahun 1966-1968. Kemudian pada periode berikutnya SMP Muhammadiyah 1 dipimpin oleh Zainal Arifin, BA dari tahun 1968-1978. Pada masa kepemimpinan Zainal Arifin, BA, beliau menjadikan bahasa arab sebagai mata pelajaran yang diprioritaskan, baik teori maupun praktiknya.

Amal usaha di wilayah Ulak Paceh pada bidang pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Berdirinya dua Sekolah Dasar yakni Sekolah Dasar Muhammadiyah Ulak Paceh dan Sekolah Dasar Buluh Kering, dan satu Madrasah Ibtida'iyah Mualimin Muhammadiyah Sidomukti. Setingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat dua SMP dan satu MTs yakni SMP Muhammadiyah Simpang Sari dan SMP Muhammadiyah Ulak Paceh serta MTs Mualimin Muhammadiyah Sidomukti. Terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas hanya terdapat satu saja yakni SMA Muhammadiyah Simpang Sari.

Melihat aktivitas dan peran Muhammadiyah di berbagai bidang mulai dari bidang religius sampai ke bidang pendidikan, dapat diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang berkesinambungan. Amal usaha Muhammadiyah di wilayah Kabupaten MUBA meliputi bidang pendidikan, religius, ekonomi, dan politik. Tampaknya Muhammadiyah di MUBA lebih dominan pada bidang pendidikan dan religius. Hal ini terbukti dari banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang didirikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Pada bidang religius Muhammadiyah melakukan gerakan dakwah berupa pengajian dan kajian keislaman. Pengajian ini berorientasi pada penekanan dan praktek keagamaan di wilayah MUBA, sehingga masyarakat dapat menjalankan Islam yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits. Meski tidak sedominan pada bidang pendidikan dan religius Muhammadiyah juga memiliki peran pada bidang politik dan ekonomi. Pada bidang politik Muhammadiyah ikut serta Membangun dan menjalankan politik kebangsaan dalam mengawal perpolitikan agar tetap pada jalur yang benar. Sementara itu, pada perkembangan politik lokal Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi yang tergabung dalam beberapa organisasi lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam lainnya. Pada bidang ekonomi Muhammadiyah mendirikan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang berperan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya kelas menengah ke bawah. Majelis ini biasanya ada di setiap Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang ada di wilayah MUBA. Jadi Muhammadiyah merupakan organisasi yang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat di kawasan MUBA. Muhammadiyah menjadi salah satu sejarah Islam lokal

yang ada di wilayah Kabupaten MUBA dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter masyarakat Islami.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi historis Muhammadiyah masuk ke wilayah MUBA sekitar tahun 1926 ditandai dengan berdirinya Sekolah Muhammadiyah di wilayah pedesaan (Ulak Paceh). Muhammadiyah dalam bentuk sekolah merupakan data yang paling awal dalam melihat munculnya Muhammadiyah di Sekayu. Dalam bentuk organisasi Muhammadiyah, data mengenai Muhammadiyah barulah di temukan sekitar tahun 1930-an keatas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Muhammadiyah dapat masuk dan berkembang di wilayah Kabupaten MUBA. Masuknya Muhammadiyah ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor geografis, faktor religius (sosial-budaya) serta dualisme *kaum tuo* dan *kaum mudo*.

Faktor geografis, wilayah MUBA yang dulunya masuk dalam teritorial *Onder Afdeeling* Musi Hilir berada di posisi *center* dari tiga wilayah perkotaan yakni Bengkulu, Jambi dan Palembang. Bengkulu tepatnya di Kepahiang merupakan basis perkembangan Muhammadiyah yang cukup pesat. Hal ini mengakibatkan persebaran Muhammadiyah berlanjut ke daerah Sekayu sebagai pusat kota *Onder Afdeeling* Musi Hilir yang lebih dekat dengan Bengkulu dibandingkan dengan Jambi ataupun Palembang yang merupakan basis gerakan konservatif (*kaum tuo*).

Faktor religius, kondisi keagamaan di wilayah MUBA menjadi salah satu alasan mengapa Muhammadiyah dapat masuk dan berkembang. Proses Islamisasi di wilayah MUBA sudah lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di *Iliran*. Masyarakat yang sudah terislamisasikan menjadi mudah menerima serta terbuka dengan konsep keagamaan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Banyak juga *Kiai* kota yang menjadikan wilayah *Iliran* sebagai daerah dakwahnya. Faktor sosial-budaya, wilayah MUBA termasuk pada wilayah *Iliran* yang cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah *Uluan*. Bahkan digambarkan bahwa wilayah *Iliran* ini setelah Islam masuk pemahaman seputar kepercayaan lama sudah mulai memudar. Berbeda dengan wilayah *Uluan* yang masih sangat kuat dengan kepercayaan lama bahkan setelah masuknya Islam kepercayaan lama ini bercampuraduk dengan konsep keislaman.

Dualisme *kaum tuo* dan *kaum mudo*. Faktor ini menjadi sangat penting, sebab dualisme ini membentuk proses persebaran Muhammadiyah khususnya di Sumatera menjadi di wilayah pedalaman. *Kaum tuo* berkonsentrasi di wilayah perkotaan (pesisir). Sedangkan *kaum mudo* mengibarkan sayapnya di wilayah pedalaman berawal di Minangkabau hingga ke sisi Bukit Barisan

dan akhirnya sampai di Bengkulu. Setelah sampai di Bengkulu, Muhammadiyah menjadikan sekayu sebagai tempat persinggahan selanjutnya tepatnya di wilayah pedesaan (Ulak Paceh).

Selanjutnya, mengenai perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten MUBA yang mulai masuk pada tahun 1926 hingga perkembangannya sampai akhir abad ke-20 (1998) akan di bagi pada dua yakni perkembangan Muhammadiyah pada sebelum kemerdekaan (masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang) serta masa sesudah kemerdekaan (masa Orde Lama dan Orde Baru). Kedudukan dari organisasi Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berperan sangat penting guna menjalankan dalam pembaharuan bidang pendidikan, sosial-politik, dan religius. Peran Muhammadiyah ini akhirnya meninggalkan jejak historis yang menjadi sejarah dalam perkembangan Islam lokal di wilayah MUBA. Masa sebelum kemerdekaan ini mencakup masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda Muhammadiyah di wilayah sekayu yang awalnya berkembang di pedesaan berfokus pada bidang religius seperti pengajian dan kajian keislaman serta pendidikan yang masih menggunakan sistem pengajaran yang sederhana. Selain itu, Muhammadiyah sebelum berdirinya sekolah Muhammadiyah, dakwah dilakukan secara perorangan oleh tokoh-tokoh setempat dan dari sisi organisatorisnya belum terlalu baik. Itulah mengapa sangat dikit sekali data mengenai masa perkembangan awal Muhammadiyah ini. Berlanjut pada masa pendudukan Jepang, perkembangan Muhammadiyah sedikit terhambat dengan dibekukannya seluruh pendidikan yang berbasis Islam. Sehingga pada masa ini Muhammadiyah melakukan dakwah dan pengajarannya di Masjid-masjid atau di langgar-langgar. Namun, hal ini justru menambah kesuburan semangat perjuangan. Muhammadiyah yang intens di wilayah pedesaan membangkitkan semangat juang berdasarkan kaca mata Islam untuk bergerak melawan penjajahan (kebathilan).

Pada masa kemerdekaan Muhammadiyah mulai meluas ke wilayah-wilayah lain yang ada di pedalaman Kabupaten MUBA. Perkembangan ini terus berlanjut hingga sekitar tahun 1970-an berdiri PDM di wilayah Sekayu. Ditandai dengan berdirinya PDM ini, cabang Muhammadiyah lain seperti PCM dan PRM semakin terorganisir, baik itu dari segi agenda kegiatannya atau dari sisi pendataannya. Jadi pada masa ini Muhammadiyah mengalami perkembangan pada aspek keorganisasirannya yang sebelumnya belum terlalu rapi kini mulai lebih baik lagi.

Sementara itu, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tentu memiliki peran khususnya di wilayah MUBA. Peran Muhammadiyah ini dapat dilihat dari empat bidang amal usaha Muhammadiyah yakni bidang ekonomi, bidang dakwah dan kesejahteraan sosial, bidang politik, serta bidang pendidikan. Pada bidang ekonomi Muhammadiyah berperan aktif dengan mendirikan koperasi. Kelompok koperasi ini biasanya ada di setiap PCM yang ada di wilayah Kabupaten MUBA. Koperasi ini bertujuan untuk mengelola dana kas Muhammadiyah yang di peruntukan

untuk membantu usaha golongan menengah ke bawah. Dengan begitu masyarakat yang memerlukan modal usaha dapat dibantu sehingga perekonomian di kalangan masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik. Dana kas ini berasal dari sumbangan sukarela anggota Muhammadiyah yang diadakan setiap pertemuan atau rapat, serta bantuan dari pihak-pihak lainnya. Peran Muhammadiyah di bidang dakwah dan kesejahteraan sosial ini berkaitan dengan aktivitas Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah secara universal. Muhammadiyah membangun masjid atau mushalla untuk kepentingan peribadatan masyarakat. Kajian keislaman untuk kepentingan akidah dikalangan masyarakat agar terhindar dari paham atau ajaran yang menyimpang. Hal ini juga merupakan realisasi dari visi dan misi Muhammadiyah untuk memberantas TBC (*takhayul, bid'ah, dan khurafat*). Selain itu, terdapat gerakan sosial GAS (Gerakan Amal Shaleh) yakni gerakan pengumpulan infak dan sedekah yang dalam praktiknya diadakan sebelum kegiatan Muktamar, pengajian, ceramah ramadhan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha.

Pada bidang politik peran Muhammadiyah memang tidak secara langsung atau tidak ikut dalam politik praktis. Tetapi, secara garis besar Muhammadiyah ikut serta dalam mengawasi jalannya perpolitikan. Hal ini tergambar dari kepatuhan Muhammadiyah yang mengikuti kebijakan pemerintah yang dinilai baik untuk kelangsungan hidup bernegara. Selain itu, Muhammadiyah juga bergabung menjadi bagian dari Masyumi yang merupakan gabungan dari organisasi Islam lainnya.

Bidang pendidikan merupakan bidang yang paling dominan bila dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Hal ini berdasarkan besarnya pengaruh Muhammadiyah yang tergambar dari banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri. Muhammadiyah yang memang sejak awal berdiri memang memiliki tujuan memperbaiki dua hal yakni perihal praktek keagamaan yang menyimpang dan lembaga pendidikan Islam yang tertinggal. Muhammadiyah di Kabupaten MUBA telah meninggalkan banyak jejak historis, pada tingkat pra sekolah terdapat TK ABA, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah. Semua lembaga pendidikan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten MUBA, baik di pusat Kota Sekayu ataupun di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Mizan, 2000.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

- Febriansyah, M. Raihan, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Hasan, Mohammad. *Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- IKPM Musi Banyuasin. *Sejarah Pergerakan Rakyat Musi Banyuasin*. Sekayu: T.pn., 2016.
- Ismail. *Madrasah Dan Pergolakan Sosial Politik Di Keresidenan Palembang, 1925-1942*. Yogyakarta: IDEA Press, 2014.
- Katalog BPS Kab. Musi Banyuasin. *Musi Banyuasin dalam Angka 1998*, 1998.
- Katalog BPS Kab. Musi Banyuasin. *Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka Musi Banyuasin Regency in Figures*, 2020.
- Karim, M. Rusli. (ed). *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Makmur, Djohan, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1993.
- Madjied, M. Dien dan Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Peeter, Jeroens. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. terj. Sutan Maimoen. Yogyakarta: INIS, 1997.
- Rasyid, Alfabri, dkk. *Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Selatan*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2010.
- Suminto, Husnul Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Indlandsce Zaken*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Su'ud, Abu. *Sejarah, Islamologi: Ajaran dan Perananannya dalam Peradaban Umat Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Maharani, Elsi. "Studi Tentang Aktifitas Organisasi Muhammadiyah dalam Kegiatan Dakwah di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 1998.
- Muslandik. "Dampak Organisasi Terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Seri Kembang Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Perbandingan Terhadap Organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2007.

- Nurholis. "Sejarah Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2015", *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Prianto. "Perkembangan Muhammadiyah Dan Perannya di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014.
- Asmaria, Isma dan Ponirin. "Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 1, No. 2 (Tahun 2013).
- Fatma dan Alfabri Rasyid. "Perkembangan Muhammadiyah Di Kecamatan Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin". *Jurnal Criksetra* Vol. 5, No. 10, (2016).
- Ikkal, Muhamad. dkk. "Sejarah Keberadaan Muhammadiyah Di Minangkabau Perspektif Hamka dalam Karya *Ayahku*". *Jurnal Studi Al-Quran* Vol 14 No 1 (2018).
- Jannah, Miftahul. "Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924" *Journal of History* Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Panji, Kemas A. R. dan Sri Suriana. "Sejarah Keresidenan Palembang", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* Vol. 14 No. 2 (Tahun 2014).
- Rahman, Hafizur. "Peran Organisasi Muhammadiyah Dalam Modernisasi Ekonomi Masyarakat Islam di Kota Pekanbaru". Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, (2017).
- Rahman, Abdul. "Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama" *Proceedings of National Seminar Research and Community Service Institute*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2017).
- Rusydi, ST Rajiah. "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan dan Tokoh)" *Jurnal Tarbawi* Vol. 1, No. 2 (Tahun 2016).
- Siddik, Dja'far. "Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* Vol 1, No. 1 (Januari-Juni 2017).